

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu "*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*" maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Batam untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Stasiun KIPM Batam Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai KIPM pada tahun anggaran 2023.

Demikian RKT Stasiun KIPM Batam Tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Batam, Januari 2023

Kepala Stasiun KIPM

M. DARWIN SYAH PUTRA



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat

persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) hambatan non tarif (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Batam Tahun 2023 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Batam Tahun 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Batampada Tahun 2023.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Batam adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Batam Tahun Anggaran 2019 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Batam tahun 2015-2023 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Stasiun KIPM Batam Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Batam pada Tahun 2023.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” serta menetapkan misi antara lain :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan KIPM adalah “**Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya**” serta menetapkan misi :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi

BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2015-2019, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi :
 - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit
 - Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)

- b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam empat prespektif antara lain :

- SS.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
- SS.2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
- SS.3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
- SS.4. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2023. Indikator kinerja BKIPM seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja Program KIPM Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023				
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT SKIPM Batam (%)	98
		2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100
		3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam (lokasi)	1
		5	Dokumen mitigasi risiko lalu lintas pada media pembawa (laporan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas lingkup UPT SKIPM Batam (dokumen)	1
		6	Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Batam (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam (lokasi)	1
		8	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menetapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Batam	6
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				

SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam (sertifikat)	5
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	2
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	30
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	18

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84
		16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	74
		17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam (Parameter)	1
		18	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1

KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Unit kerja berpredikat WBK Lingkup UPT SKIPM Batam (Unit)	1
		20	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam (Indeks)	84
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	85
		22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Batam (%)	<0,5
		23	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	75
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	89

		25	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	86
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	77,5
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Batam (%)	77,5

DATA ANGGARAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	246.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	308.018.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	281.210.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.390.690.000
Total Anggaran SKIPM Batam Tahun 2023		6.225.918.000

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleng meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestic. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran eksport produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana

hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Batam

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Batam Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Stasiun KIPM Batam dalam mendukung visi Kementerian Kelautandan Perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Batam untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Program : **Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : **Rp. 6.225.918.000,-**

DATA ANGGARAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	246.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	308.018.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	281.210.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.390.690.000
Total Anggaran SKIPM Batam Tahun 2023		6.225.918.000

2.5. Rincian Target IKU

RINCIAN TARGET IKU

UNIT
KERJA STASIUN KIPMBATAM
TAHU
N 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET						TARGET 2023	
					TW I	TW II	SMT I	TW III	s/d TW III	TW IV		s/d TW IV
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT SKIPM	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT SKIPM Batam	dokumen	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6	Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity Lingkup Stasiun KIPM Batam	UUPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00
10	Jumlah sertifikat CPiB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam	Produk	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	3,00	15,00	15,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	6,00	12,00	12,00	15,00	15,00	18,00	18,00	18,00
15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam	nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam	Persen (%)	Rata-rata	Triwulan	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam	parameter	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
18	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
19	Unit kerja berpredikat WBK Lingkup UPT SKIPM Batam	Unit	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
20	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00
21	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT SKIPM Batam	nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Batam	Persen (%)	Rata-rata	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,13	0,50
23	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00
25	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam	nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00
26	Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	77,50
27	Tingkat Kepatunanan Pengetahuan BMN Lingkup SKIPM Batam	Persen (%)	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	77,50

Mengetahui
Kepala SKIPM Batam

M. Darwin Syah Putra



BAB III. PENUTUP

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2023 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
2. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai KIPM Batam, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan TA 2023 dalam mewujudkan "*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*".

